**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA
MELALUI PENGELOLAAN BUMDES
(STUDI KASUS DESA KEDUNGGARAN KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
RIFKI MAULANA
NIM. 4117383

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2022

**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA
MELALUI PENGELOLAAN BUMDES
(STUDI KASUS DESA KEDUNGGARAN KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
RIFKI MAULANA
NIM. 4117383

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIFKI MAULANA

NIM : 4117383

Judul Skripsi : **Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Desa Melalui
Pengelolaan BUMDes (Studi Kasus Desa Kedungjaran
Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya penulis, kecuali dalam kutipan yang sudah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Pekalongan, 6 Januari 2022

Yang menyatakan

RIFKI MAULANA

NIM. 4117383

NOTA PEMBIMBING

Tsalis Syaifuddin, M.Si

Plalangan RT.05 RW.01 Gunungpati Semarang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Rifki Maulana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : **Rifki Maulana**

NIM : **4117383**

Judul Skripsi : **Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui Pengelolaan BUMDes Studi Kasus desa Kedungjaran kecamatan Sragi kabupaten Pekalongan**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 8 Januari 2022

Pembimbing

Tsalis Syaifuddin, M.Si

NIP. 19780803 201801 1 002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kabupaten Pekalongan 51161

Website: www.febi.iain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara/i:

Nama : RIFKI MAULANA

NIM : 4117383

Judul : STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA
MELALUI PENGELOLAAN BUMDES (Studi Kasus Desa
Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.E)

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. AM. M. Hafidz MS., M.Ag

NIP. 19780616 200312 1 003

Penguji II

M. Izza, M.Si

NIP.1979072607 201608D 1 0968

Pekalongan, 10 Mei 2022

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Dr. I. Sinta Dewi Rismawati, S.H, M.H.

NIP. 19750220 199903 2 001

ABSTRAK

Rifki Maulana. 2021. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui Pengelolaan BUMDes Studi Kasus desa Kedungjaran kecamatan Sragi kabupaten Pekalongan.

Pembangunan ekonomi secara sentralistis di Indonesia efektif dan efisien untuk pembangunan yang merata. Melalui program nawacita pemerintah mencoba membangun perekonomian melalui Desa. Desa Kedungjaran kecamatan Sragi kabupaten Pekalongan merupakan salah satu representasi desa di Indonesia yang mencoba membangun perekonomian melalui BUMDes. Latar belakang berdirinya BUMDes Kedungjaran yaitu karena dana desa tidak selamanya ada. Maka BUMDes Kedungjaran kedepan bisa menghasilkan pendapatan asli desa seperti yang tercantum dalam AD/ART BUMDes. Pendapatan Asli Desa bisa menjadi penopang dalam pembangunan ekonomi desa.

Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat desa kedungjaran. Serta bagaimana strategi Peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui Pengelolaan BUMDes. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan atau (*field research*). Kemudian metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi.

Metode Analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi secara sosial dan ekonomi setelah adanya BUMDes menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dengan berbagai program yang dilaksanakan oleh BUMDes Kedungjaran. BUMDes Kedungjaran mempunyai kapasitas yang baik dalam strategi peningkatan pendapatan asli desa. Beberapa unit usaha BUMDes yang dapat menjadi kekuatan dalam meningkatkan pendapatan asli desa yaitu bank link, internet, pamsimas, mini market, lapangan futsal dan gedung serba guna yang masih dalam tahap pembangunan. Sementara peluang kedepan unit usaha tersebut mampu menjadi unit usaha yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat karena berbasis kebutuhan. Sementara kelemahan dan ancaman masih dalam lingkup regenerasi pengelola yang masih minim. Di tahun 2022 BUMDes Kedungjaran akan mulai mengalokasikan usahanya untuk PAD sebesar 25 %, untuk gaji pengelola 25% dan untuk modal 50%. Dalam sudut pandang pembangunan ekonomi islam BUMDes Kedungjaran telah memnuhi sebagian tujuan dari pembangunan ekonomi perpspektif islam yaitu, *masalah oriented, people oriented*, sementara *falah oriented* dalam penelitian ini belum tercapai sebab salah satu unit usaha BUMDes yaitu Bank link, masih menggunakan Bank konvensional.

Kata Kunci : BUMDes, Kedungjaran, Pendapatan Asli Desa.

ABSTRACT

Rifki Maulana. 2021. Thesis. Faculty of Islamic Economics and Business IAIN Pekalongan. Strategy to Increase Village Original Income through BUMDes Management Case Study in Kedungjaran village, Sragi sub-district, Pekalongan district.

Economic development with the top down method is considered less effective and efficient in improving the welfare of the community. Through the Nawacita program, the government tries to build the economy with the bootom up method, namely through the village. Kedungjaran village, Sragi sub-district, Pekalongan district is one of the representations of villages in Indonesia that are trying to build the economy through BUMDes. The background of the establishment of BUMDes Kedungjaran is because village funds do not always exist. So, in the future, BUMDes Kedungjaran can generate original village income as stated in the AD/ART BUMDes. Village Original Income can be a pillar of village economic development.

The formulation in this study is how the socio-economic conditions of the Kedungjaran village community. And how is the strategy for Increasing Village Original Income through BUMDes Management. This research uses qualitative research methods and the type of field research or (field research). Then the method of collecting data using the method of observation, interviews and documentation.

The results showed that the BUMDes Kedungjaran had a good capacity in the strategy of increasing village original income. Several BUMDes business units that can be a force in increasing village original income are bank links, internet, PAMSIMAS, mini markets, futsal fields and multi-purpose buildings which are still under construction. Meanwhile, in the future, the business unit will be able to become a business unit that is very much needed by the local community because it is based on needs. Meanwhile, the weaknesses and threats are still in the scope of the regeneration of managers, which are still minimal. In 2022, BUMDes Kedungjaran will start allocating its business for PAD by 25%, for manager salaries 25% and for capital 50%. From the point of view of Islamic economic development, BUMDes Kedungjaran has fulfilled the objectives of economic development from an Islamic perspective, namely, masalah oriented, people oriented, and falah oriented.

Keywords: BUMDes, Kedungjaran, Village Original Income.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
3. Bapak M. Aris Safi'I, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Ibu Happy Sista Devy, S.E., M.M. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
5. Bapak Tsalis Syaifuddin M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muh Izza, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan beserta staff.
8. Pihak Kepala Desa Kedungjaran dan Pengelola BUMDes Kedungjaran yang telah memberikan data penelitian.

9. Kedua orang tua saya Bapak Subhi dan Ibu Salamah yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan secara moral dan material serta menyemangati saya.
10. Segenap keluarga saya yang selalu memberikan semangat, canda tawa dan kehangatan untuk saya.
11. Sahabat PMII Pekalongan dan Silvana Elfa Tiara yang selalu memberikan semangat serta membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 5 Januari 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rifki Maulana', is written over a light blue rectangular background.

Rifki Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Landasan Teori	11
1. Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	11
a. Definisi Pembangunan Ekonomi Konvensional	11
b. Tujuan Pembangunan Ekonomi	12
c. Pembangunan Ekonomi Islam.....	14
2. Pembangunan Ekonomi Desa	17
a. Otonomi Desa.....	17
b. Pendapatan Asli Desa.....	21
3. Badan usaha Milik Desa (BUMDes)	22
a. Pengertian.....	22
b. Tujuan dan Fungsi.....	25

c. Dasar Hukum	26
4. Strategi	29
a. Pengertian.....	29
b. Tujuan dan Fungsi.....	30
B. Telaah Pustaka.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Setting Penelitian.....	38
D. Subjek Penelitian	38
E. Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Keabsahan Data.....	40
H. Metode Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Profil Desa	44
B. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Kedungjaran	46
1. Kondisi Sebelum Adanya BUMDes	46
2. Kondisi Setelah Adanya BUMDes	48
C. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui Pengelolaan BUMDES	52
1. Profil BUMDes Kedungjaran	52
2. Strategi Restrukturisasi dan Kulturisasi.....	62
a. Kekuatan BUMDes Kedungjaran.....	62
b. Kelemahan BUMDes Kedungjaran.....	65
c. Peluang BUMDes Kedungjaran	65
d. Ancaman BUMDes Kedungjaran.....	68
3. Orientasi pembangunan dalam Islam.....	69
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Keterbatasan Penelitian	75

C. Implikasi.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

LAMPIRAN

1. Lampiran 1 <i>Interview Guide</i>	I
2. Lampiran 2 Transkrip Wawancara	VI
3. Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian.....	XXII
4. Lampiran 4 Surat Bukti Penelitian	XXIV
5. Lampiran 5 Dokumentasi	XXV
6. Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup	XXVIII

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan havi
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشَّمْسُ	ditulis	Asy-samsu
الرَّجُلُ	ditulis	Ar - Rojulu
السَّيِّدَةُ	ditulis	As - Sayidanah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القَمَرُ	ditulis	al-qamar
البَيْعُ	ditulis	al-badi’
الجَالِلُ	ditulis	al-jalāl

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, harus hamzah ituditransliterasikan dengan apostrof /’/.

Contoh:

أَمْرٌ	ditulis	umirtu
شَيْءٌ	ditulis	syai’u

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Narasumber, 38
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Kedungjaran berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021, 45
Tabel 4.2	Jenis Usaha BUMDes Kedungjaran, 59
Tabel 4.3	Jumlah Nasabah Bank Link, 62
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan berdasarkan Generasi, 67
Tabel 5.1	Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kedungjaran sebelum dan setelah adanya BUMDes, 73
Tabel 5.2	Analisis SWOT BUMDes Kedungjaran, 73

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 *Interview Guide*, I
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara, VI
- Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian, XXII
- Lampiran 4 Surat Bukti Penelitian, XXIV
- Lampiran 5 Dokumentasi, XXV
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup, XXVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan upaya strategis yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Objek dari pembangunan ekonomi sendiri yaitu suatu wilayah atau negara. Masyarakat merupakan salah satu komponen atau subjek yang berperan sebagai *stekholder* dalam pembangunan ekonomi. Selain sebagai perencana pembangunan, masyarakat pula yang akan merasakan dampak dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Maka dalam hal ini pembagian tugas dalam sebuah negara sesuai tugas pokok dan fungsi sangat diperlukan guna mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Dalam sejarah pembangunan ekonomi Indonesia mengalami dinamika sesuai kebutuhan serta peran pemimpinnya. Pada masa Orde lama, Indonesia masih fokus dengan penataan struktur politik yang mengalami beberapa kali percobaan untuk menemukan kesesuaian dengan budaya masyarakat Indonesia. Sementara pembangunan ekonomi pada masa orde lama belum menjadi fokus utama. Sehingga pada masa orde lama menjelang turunya Ir. Soekarno Indonesia mengalami gejolak inflasi sebesar 650 % (Dirjen Sejarah dan Purbakala, 2011).

Setelah tumbang orde lama yang digantikan dengan orde baru, mulailah Indonesia membuka kran Investasi dengan disahkannya Undang – Undang Penanaman Modal Asing (PMA) yang disahkan pada tahun 1967. Selain dibukanya kran investasi, pada masa orde baru upaya pembangunan

ekonomi lainnya yaitu dengan program *Pelita* atau Pembangunan lima Tahun. *Pelita I* (1969 – 1974), yang menekankan pada sektor pertanian serta industri kebutuhan pokok, *Pelita II* (1974 – 1979), fokus pada pertanian dan industri pengelolaan bahan mentah, *Pelita III* (1979 – 1984) pada industri pertanian dan industri pengelolaan bahan jadi atau modal, *Pelita IV* (1984 – 1989), menekankan pada pertanian dan industri bahan konsumen, *Pelita V* (1989 – 1994), fokus pada swasembada sektor pertanian dan industri penghasil barang konsumen (Arifmunandar, 2017).

Pembangunan ekonomi pada masa orde baru membuktikan kinerja yang baik dengan berbagai swasembada. Selain swasembada pada masa orde baru Indonesia juga memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, maka tidak heran pada masa itu Indonesia dijuluki dengan Macan Asia. Namun dari beberapa keberhasilan pembangunan ekonomi pada masa orde, ada sisi kekurangan yang menjadi evaluasi bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi yang bersifat sentralis dan *Java Centris*, berdampak pada pembangunan ekonomi yang kurang merata serta pemerintah daerah hanya bersifat formalitas (Ferizaldi, 2016). Undang – Undang No.5 Tahun 1974 kurang dilaksanakan secara maksimal yang mengakibatkan pula pemerintah orde baru harus direformasi. Pada masa reformasi dikeluarkan Undang – Undang baru tentang desentralisasi wilayah yaitu UU No. 22 Tahun 1999. Undang – undang tersebut diberlakukan guna memaksimalkan pembangunan ekonomi masing – masing daerah.

Dampak dari dikeluarkannya Undang – Undang No.22 Tahun 1999 secara fundamental telah merubah sistem pemerintahan desa dari secara administratif formal saja ke arah demokrasi serta desentralisasi pemerintahan yang lebih baik. Karena melihat UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa namun dalam pelaksanaannya masih bersifat sentralistis dari pemerintahan pusat. UU No.22 Tahun 1999 kembali mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang – Undang No.32 Tahun 2004. Namun UU tersebut seakan mengembalikan desa seperti pada masa orde baru yang formalitas, meskipun dalam UU tersebut tetap menganut asas demokrasi serta desentralisasi. Dari beberapa evaluasi Undang – Undang Pemerintah Daerah yang didalamnya mengatur tentang otonomi Desa, maka dikeluarkannya kembali Undang – Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perlunya pembangunan ekonomi dengan sistem *Bottom Up* menjadi salah satu latar belakang Undang – Undang No.6 Tahun 2014 disahkan. Desa merupakan representasi kesatuan masyarakat hukum terkecil yang tidak bisa terpisahkan dalam sejarah kehidupan bangsa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Desa merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas yang berorientasi untuk kemaslahatan. Selain pemberian fasilitas yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, desa juga berpotensi sebagai garda terdepan dalam pembangunan ekonomi. Adanya UU No.6 Tahun 2014 diharapkan mampu menjadi langkah strategis dalam pembangunan ekonomi yang komprehensif.

Dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa didalamnya mengatur alokasi Dana Desa. Dana Desa yang bersumber dari APBN menjadi ujung pembangunan infrastruktur serta fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari dana Desa tersebut dapat juga dimanfaatkan untuk pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Pembangunan ekonomi melalui BUMDes dapat menjadi kegiatan produktif desa dalam memaksimalkan potensi desa serta upaya dalam menanggulangi serta mengurangi angka pengangguran.

Pedoman terbaru tentang BUMDes yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 tentang BUMdes. BUMDes dibentuk bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), menumbuhkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes berperan dalam merespon serta memanfaatkan potensi desa untuk mensejahterakan masyarakat.

Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa (UU No 6, 2014). Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa, hak asal-usul dan kewenangan skala desa. Kemudian maksud dari hasil usaha adalah termasuk hasil dari BUMDes. Selanjutnya BUMDes diatur dalam UU Cipta Kerja pasal 117 No. 11 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber

daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (Alfiansyah, 2021).

Desa Kedungjuran terletak di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan merupakan desa yang mempunyai potensi dan sumberdaya alam melimpah. Selain itu Desa Kedungjuran termasuk desa berprestasi, baik dalam penyelenggara pemerintahan maupun dalam pembangunan desa. Pada tahun 2017 mendapat predikat terbaik ke-2. Pada tahun 2017 tersebut, Bumdes Kedungjuran mendapat penghargaan berupa kinerja gotong royong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gotong royong yang dilakukan pada saat itu masyarakat Kedungjuran iuran untuk memhadakan mobil ambulance darurat yang digunakan untuk evakuasi masyarakat yang terkena musibah. Kemudian di tahun 2018 mendapatkan predikat terbaik ke-4 evaluasi perkembangan desa tahun 2018 tingkat Jawa Tengah. Di tahun 2018, Desa Kedungjuran mendapat apresiasi berupa pelayanan kartu KIP. Jadi, Masyarakat yang hendak membuat kartu KIP harus menabung di BUMDes. Program menabung tersebut juga bagian dari peningkatan pendapatan asli desa. Pada kesempatan tersebut Desa Kedungjuran mendapatkan penghargaan berupa piagam, trophy, dan uang pembinaan yang diberikan langsung oleh gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo), dalam acara peringatan hari lahir Jawa Tengah ke-68 (Kedungjuran, 2018).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Desa Kedungjuran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan melalui Badan Usaha Milik Desa yang diberi nama BUMDes Kedungjuran. Pada Oktober 2015

Kepala desa didukung BPD telah mengeluarkan Perdes No.8 Tahun 2015 tentang BUMDes yang ditujukan untuk mewadahi kegiatan keekonomian berbasis desa yang sudah ada seperti PUAP, Pamsimas, dan Lumbung Desa, agar lebih bisa maju dan berkembang (Kedungjaran, 2016).

Tujuan pembentukan BUMDes antara lain; (1) Untuk meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat, (2) Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan, dan (3) Menciptakan lapangan kerja (PD, 2015)

BUMDes Kedungjaran memberikan pelayanan berupa; Pendaftaran wifi Bumdes KDJ, perpanjangan wifi, Pembukaan rekening BNI, Setoran/nabung, Transfer BNI maupun non BNI, Penarikan BNI, Pembayaran listrik, Pembelian pulsa listrik, Pendaftaran listrik baru/instalasi, Pendaftaran BPJS, Pembayaran premi/angsuran BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan, Pembayaran cicilan kredit (FIF, WOM, Adira, Columbia, dan mega Finance), Pembayaran PDAM, Pembelian pulsa all operator, Pembayaran TV berlangganan, Pembayaran telkom/speedy/pascabayar, Pembelian tiket pesawat, Pembelian tiket kereta api, Pembelian voucher game, dan Pembayaran pajak bumi bangunan (Kedungjaran, 2016). Di bidang olahraga serta pemenuhan kebutuhan pokok, BUMDes Kedungjaran juga mengelola sarana olahraga seperti futsal serta mini market.

Semua upaya yang dilakukan BUMDes Kedungjaran ini untuk mengembangkan semua potensi yang ada, agar nantinya dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa Kedungjaran yang pada dasarnya PAD sangat berperan dalam pembiayaan pembangunan desa serta infrastruktur lainnya, selain itu diharapkan masyarakat juga dapat merasakan hasil dari kinerja pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakat desa Kedungjaran khususnya kesejahteraan pendidikan, kesehatan, serta pendapatan.

Penelitian mengenai BUMDes sudah banyak dilakukan. Namun belum ada penelitian yang fokus pada strategi pembangunan ekonomi melalui pengelolaan BUMDes. Dimana strategi adalah rencana yang disatukan menyeluruh dan terpadu dalam mengaitkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat. Selain itu dalam sebuah pembangunan ekonomi juga memperhatikan potensi yang ada baik dari aspek sumber daya alam maupun manusianya. Pembangunan ekonomi yang acapkali masih bersifat *Top down planing*, kini dengan adanya UU tentang desa dapat terwujud pembangunan ekonomi yang bersifat *Bottom up* (Gauraf dkk, 2002).

Berangkat dari sinilah penulis merasa perlu untuk mengangkat penelitian mengenai strategi peningkatan pendapatan asli desa melalui pengelolaan yang BUMDes Kedungjaran, mengingat banyak BUMDes yang mengalokasikan dana desa hanya untuk keperluan yang sifatnya jangka

pendek . Jika strategi peningkatan pendapatan asli desa melalui pengelolaan BUMDes Kedungjuran dapat menjadi contoh untuk desa - desa yang berada di Kabupaten Pekalongan, maka akan berdampak juga pada tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Sehingga penulis mencoba mengangkat penelitian dengan judul “**Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui Pengelolaan BUMDes (studi kasus di Desa Kedungjuran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data serta latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka dalam hal ini saya rumuskan rumusan masalah yang akan menjadi acuan atau landasan pencarian data :

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Kedungjuran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan ?
2. Bagaimana strategi peningkatan pendapatan asli desa melalui pengelolaan BUMDes ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini terdapat tujuan yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Kedungjuran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menggali informasi terkait strategi pengembangan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli Desa Kedungjuran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga tidak mengabaikan manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini. Ada dua jenis manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk bahan referensi penelitian selanjutnya serta dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang BUMDes.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk perencanaan strategi pendayagunaan BUMDes seperti yang dilakukan di Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian – uraian singkat yang ditulis secara sistematis untuk memberikan penulisan yang baik serta mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab dua membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Beberapa pokok bahasan yang akan ditulis yaitu tentang strategi, pendapatan asli desa, BUMDes serta ekonomi pembangunan dilihat secara konvensional dan perencanaan pembangunan ekonomi dalam

islam. Selain itu dalam bab ini memaparkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara dalam memperoleh data meliputi jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu, objek dan subjek, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini dijelaskan tentang hasil penelitian serta pembahasan strategi peningkatan pendapatan asli desa melalui pengelolaan BUMDes di Desa Kedungjuran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

BAB V PENUTUP

Bab lima menguraikan beberapa saran dan kesimpulan bagi pihak – pihak yang berkepentingan guna memperbaiki dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul. Kemudian ada refrensi tulisan atau daftar pustaka, lampiran - lampiran serta riwayat pendidikan penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Salah satu tujuan didirikannya BUMDes Kedungjaran yaitu meningkatkan pendapatan asli desa. Beberapa unit usaha BUMDes yang sejak awal dirintis pada tahun 2016 sampai sekarang, berjalan dengan kinerja yang baik sehingga pada tahun 2022 BUMDes Kedungjaran secara sah akan menyumbangkan hasil usahanya untuk pendapatan asli desa sebesar 25 %.

Beberapa unit usaha BUMDes Kedungjaran yang masih dan akan beroperasi yaitu sebagai berikut :

1. Penyediaan Air Bersih (PAB)
2. Internet dan WiFi
3. Minimarket
4. Bank Link
5. Penyewaan (Gedung serbaguna dan lapangan futsal)

Hadirnya BUMDes Kedungjaran juga telah memberi manfaat untuk masyarakat setempat dalam segi ekonomi dan sosial.

Tabel 5.1
kondisi social ekonomi sebelum dan setelah adanya BUMDes

	sebelum adanya BUMdes	setelah adanya BUMDes
kondisi sosial	1. jaminan keselamatan warga kurang	1. mobil siaga dan bantuan sosial Rp.200.000
	2. pencairan dana sosial seperti PKH susah dalam pencairan	2. Kartu Rekening membantu pencairan dana sosial
	3. Air bersih langka karena mengandung garam	3. Air Bersih tersedia
kondisi ekonomi	1. masyarakat terbiasa dengan hutang	1. budaya menabung terbangun
	2. kesusahan dalam transaksi antar kota	2. bank link memudahkan transaksi antar kota

Sementara dari strategi peningkatan pendapatan asli desa melalui BUMDes, konsep analisis SWOT yaitu *Strenghts* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) menjadi salah satu analisis yang tepat dan relevan untuk memperkuat strategi.

Tabel 5.2
Analisis SWOT BUMDes Kedungjaran

	Internal	eksternal
mendukung	strenghts (kekuatan)	opportunities (peluang)
	1. jumlah nasabah bank link 848	1. permen Desa PDDT No.7 tahun 2021
	2. jaringan peneglola BUMDes luas	2. menjadi badan hukum (UU Ciptaker no 11 tahun 2020 Pasal 117 ayat 1
	3. pelanggan wifi atau internet sudah mencapai luar desa	3. jasa penyewaan gedung
	4. minimarket dengan stock barang sendiri	4. sinergisitas antara lapangan futsal dan minimarket
	5. regulasi AD/ART PAD 25%	5. digitalisasi ekonomi

	6. Kebijakan menabung setiap pembuatan administrasi desa	6. kebiasaan masyarakat merantau
		7. masa pandemi untuk usaha internet dan wifi
		8. bonus demografi
menghambat	weakness (kelemahan)	threats (ancaman)
	1. SDM Pengelola BUMDes minim	1. regenrasi kepengurusan
	2. pengelolaan sistem keuangan belum baik	2. covid 19 menghambat pembangunan BUMDes
	3. gaji pengelola minim	

Sementara, dalam segi pembangunan ekonomi perspektif Islam, BUMDes Kedungjaran memenuhi 2 kriteria sebagaimana tujuan dalam pembangunan ekonomi Islam yaitu :

1. *People oriented* , yaitu tujuan untuk kemanusiaan. BUMDes Kedungjaran dari awal berdiri sampai sekarang tentu sudah banyak berkontribusi untuk misi kemanusiaan seperti layanan keuangan, air bersih, dan internet.
2. *Mashlahat oriented* , BUMDes Kedungjaran telah memberikan mashlahat atau kesejahteraan bagi masyarakat desa. Tidak ada program atau unit usaha yang menguntungkan satu kelompok atau golongan tertentu. Hal tersebut bisa dilihat dari perubahan kebiasaan masyarakat desa yang kurang produktif menjadi produktif.
3. *Falah oriented* , dalam konteks falah atau kemenangan, BUMDes Kedungjaran belum bisa mencapai konsep falah karena salah satu

unit usaha yaitu Bank link belum menggunakan Bank syariah. Sedangkan bank konvensional belum bisa dikatakan dalam konsep falah.

B. Keterbatasan penelitian

Ada beberapa keterbatasan dalam proses pelaksanaan penelitian ini. Keterbatasan ini harapannya bisa menjadi patokan penelitian selanjutnya agar bisa lebih baik lagi. Diantara keterbatasan penelitian tersebut yaitu dilihat dari sudut pandang informan atau narasumber :

1. Informan yang menjadi pelopor BUMDes Kedungjuran sudah tidak menjabat dan kini telah tinggal di Jakarta. Melalui media sosial informan tersebut tidak bisa dihubungi. Sehingga informasi yang bisa peneliti dapat yaitu dari orang – orang yang pernah berjuang bersama beliau.
2. Berbagai perangkat desa yaitu kepala desa, sekretaris, dan bendahara tidak bisa sepenuhnya memberikan informasi yang lebih luas dikarenakan kesibukan di akhir tahun untuk tutup buku.

C. Implikasi

1. Secara teoritis, penelitian ini membuktikan teori pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam bingkai NKRI sesuai dalam nawacita ke – 3. Selain itu, teori *bottom up* terbukti yaitu salah satu contoh kongkrit BUMDes Kedungjuran kecamatan Sragi kabupaten Pekalongan dalam membangun ekonomi desa.

2. Secara praktis, penelitian ini menjadi contoh kongkrit pembangunan ekonomi dari desa atas beberapa undang – undang dan peraturan yang telah terbukti bagi pembangunan ekonomi desa. Seperti undang – undang desa, dana desa, dan peraturan BUMDes. Pengoptimalan BUMDes dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, kurang lebih separuh penduduk Indonesia yaitu berada di pedesaan. Maka BUMDes bisa menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang bisa berdampak untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K. A. (2019). *metode penelitian kualitatif*. Semarang: LPSP.
- Alfiansyah. (2021). *Status BUMDes sebagai Badan Hukum atas Diundangkannya UU Cipta Kerja*. *jurnal ilmu sosial dan pendidikan*, 217.
- Amir, H. (2018). *optimalisasi pendapatan asli desa dan badan usaha milik desa dalam meningkatkan perekonomian*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Anom, S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa spirit usaha kolektif desa*. Jakarta: Kemneterian Desa PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- arifmunandar, b. (2107). *analisis konsep pertumbuhan ekonomi indonesia pada masa orde baru perspektif kapitalisme dan islam*. Makassar: uin alaudin Makassar.
- Borni, K. (2015). *Desa Mandiri Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Conny, S. (2010). *Metode Penelitian kualitatif jenis karakter dan keunggulannya*. Jakarta: Gramedia.
- Dharma, S. (2003). *otonomi daerah dalam perspektif lingkungan nilai dan sumber daya*. Jakarta: djembatan.
- Didiet, D. (2019). *peran bumdes dalam pemberdayaan masyarakat*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Dila, I. d. (2016). *hukum pemerintahan desa perspektif, konseptualisasi dan konteks yuridis*. Yogyakarta: Cv. Absolute Media.
- Edy, d. (2016). *pngembangan desa mandiri melalui pengelolaan BUMDes*. *JDEB*, 68.
- Eko, P. (2016). *Buku Panduan Pelaksanaan Undang – Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpedam PBNU.
- Fandi, T. (2000). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi.
- ferizaldi. (2016). *dinamika otonomi daerah di indonesia*. Sulawesi: unimal press.
- Hartini. (2019). *peran bumdes dlam meningkatkan kesehjateraan masyarakat*. PARE PARE: IAIN PARE PARE.
- Heru, d. (2020). *Pengelolaan Dana desa studi dari sisi demokrasi dan kapasitas pemerinthan Desa*. Jakarta: LIPI Press.
- Hustowiyoo. (2014). *Plembagaan BUMDes*. Yogyakarta: FPPD.

- Jajang dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta :Bank Indonesia.
- Jonathan, S. (2006). *metode penelitian kualitataif dan kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- kementerian keuangan republik indonesia. (2017). *buku pintar dana desa, dana desa untuk kesejahteraan masyarakat*. Jakarta: kementerian keuangan republik indonesia.
- Komang, d. (2019). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa sebaga Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *jurnal pendidikan ekonomi*, 11.
- Maria, R. (2016). Peranan BUMDes pada masyarakat pedesaan pada BUMDes gunung kidul Yogyakarta. *MODUS*, 160.
- Muhammad, H. (2018). upaya peningkatan pendapatan asli desa di desa batuah kabupaten kutai kartanegara. *e journal administrasi negara*, 4.
- Nofiratullah. (2018). *eksistensi bumdes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat*. MALANG: UIN MALANG.
- Rismaawati. (2018). *peranan bumdes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat minapolitan* . semarang: UIN Walisongo.
- Satika, R. (2018). *peran dan kontribusi bumdes terhadap kesejahteraan masyarakat menurut ekonomi islam*. lampung: uin lampung.
- Sfai'i, A. (2001). *Bank syariah dari teori ke praktek*. Jakkarta: Gema Insani.
- Slamet, J. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk meningkatkan Pembangunan Desa studi kasus Desa Bandung Mojokerto. *Media Trend*, 20.
- Sukasmento. (2014). *Rancang Bangun Binsis dan Pengelolaan BUMDes*. Yogayakarta: FPPD.
- Suparji. (2019). *pedoman tata kelolal BUMDes*. Jakarta: UAI Press.
- Syahrum, S. d. (2012). *metode penelitian kualitatif konsep aplikasi daalaam ilmu sosial keagamaan dan pendidikan*. Bandung: Citapustaka.
- Syarief, H. (2005). *otonomi daerah dalam perspektif lokal*. Jakarta: LIPI.
- Taufiqurrohman. (2016). *Manajemen Strategik*. Jakarta : Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Wahyu, A. (2019). *pengaruh bumdes terhadap peningkataan kesejahteraan masyarkat*. JAMBI: UIN JAMBI.
- Yanhar, d. (2018). analisis dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan daerah. *JPPUMA*, 15.

Yusina, H. (2008). Pemerintahan Desa dalam upaya pembangunan desa. *Jantra*, 399.

Zulkarnain, R. (2014). urgensi BUMdes dalam pembangunan perekonomian desa. *Fiat Justifia*, 428.